



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 514448,
515865, 515866, 562682 E MAIL : pmp2a@jogja.go.id, HOTLINE
SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id,
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 12a/XII/Tahun 2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PENGADAAN
DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP);
KEGIATAN PENGADAAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MEMUTUSKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan untuk penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dipandang perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Pengadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Kontruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang E - Tendering;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa ;
21. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 89 tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan Kegiatan Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

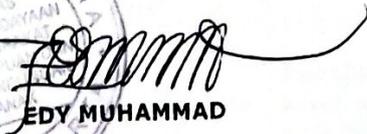
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) KEGIATAN PENGADAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 :
- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Kegiatan Pengadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan perlindungan Anak Kota Yogyakarta :
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pengadaan mempunyai tugas :
- a. Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah setelah penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS);
 - b. Perencanaan dilaksanakan untuk pengadaan yang dilakukan melalui :
 - a. Swakelola
 - b. Penyedia
 - c. Perencanaan Pengadaan yang dilakukan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Penetapan tipe Swakelola;
 2. Penyusunan spesifikasi teknis / KAK;
 3. Penyusunan prakiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - d. Perencanaan Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
 2. Penyusunan perkiraan biaya / Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 3. Pemaketan Pengadaan Barang / Jasa;
 4. Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa;
 5. Biaya Pendukung;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2019



Kepala Dinas


EDY MUHAMMAD

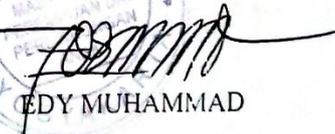
Lampiran	Surat keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak kota yogyakarta
Nomor	: 12a/XII/ Tahun 2019
Tanggal	: 23 Desember 2019

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom), PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP) KEGIATAN PENGADAAN DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP			Kegiatan
	PPKom	Pejabat Pengadaan	PPHP	
1.	Dra. Tyasning Handayani Shanti 19670206 199403 2 007	Fatmah Rosyati, SIP 19710729 199607 2001	Suwartopo 19670810 199503 1 005	Penyediaan Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi
2.	Dra. Tyasning Handayani Shanti 19670206 199403 2 007	Fatmah Rosyati, SIP 19710729 199607 2001	Suwartopo 19670810 199503 1 005	Penyediaan Jasa. Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.	Dra. Tyasning Handayani Shanti 19670206 199403 2 007	Fatmah Rosyati, SIP 19710729 199607 2001	Suwartopo 19670810 199503 1 005	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Bangunan Kantor
4.	Dra. Tyasning Handayani Shanti 19670206 199403 2 007	Fatmah Rosyati, SIP 19710729 199607 2001	Suwartopo 19670810 199503 1 005	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5.	Dra. Tyasning Handayani Shanti 19670206 199403 2 007	Fatmah Rosyati, SIP 19710729 199607 2001	Suwartopo 19670810 199503 1 005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
6.	Polana Setiya Hati, S.Si MM 197306011998032006	Retnaningtyas, SSTP 19780329 199711 2 001	Indrawati, S.Sos 19741105 200604 2 003	Pembinaan Pengarusutamaan Gender
7.	Polana Setiya Hati, S.Si MM 197306011998032006	Retnaningtyas, SSTP 19780329 199711 2 001	Indrawati, S.Sos 19741105 200604 2 003	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan
8.	Polana Setiya Hati, S.Si MM N.197306011998032006	Retnaningtyas, SSTP 19780329 199711 2 001	Indrawati, S.Sos 19741105 200604 2 003	UPT P2T 2A
9.	Fatmah Rosyati, SIP 19710729 199607 2001	Polana Setiya Hati, S.Si MM 197306011998032006	Hendro Basuki, S.KM., M.Kes. 196207301987021001	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak
10.	Fatmah Rosyati, SIP 19710729 199607 2001	Polana Setiya Hati, S.Si MM 197306011998032006	Hendro Basuki, S.KM., M.Kes. 196207301987021001	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak
11.	Retnaningtyas, SSTP 19780329 199711 2 001	Hendro Basuki, S.KM., M.Kes. 196207301987021001	Tutut Hari Kartono, A.Md 196207301987021001	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
12.	Retnaningtyas, SSTP 19780329 199711 2 001	Hendro Basuki, S.KM., M.Kes. 196207301987021001	Tutut Hari Kartono, A.Md 196207301987021001	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Yogyakarta, 23 Desember 2019

Kepala Dinas


 EDY MUHAMMAD